

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)**

(Studi Kasus Di PT BPRS PUDUARTA INSANI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Nama : Linda Apriani

Nim : 51143010

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)**

(Studi Kasus Di PT BPRS PUDUARTA INSANI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Nama : Linda Apriani

Nim : 51143010

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M /1440 H

ABSTRAK

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**

(Studi Kasus di PT BPRS Puduarta Insani)

Linda Apriani

NIM : 51143010

Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

Laporan keuangan berisi informasi yang menyangkut posisi keuangan dan bertujuan untuk membantu entitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif-komparatif yaitu dengan cara : 1) Memaparkan laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani tahun 2017, 2) Mengamati, membandingkan, dan menganalisis laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani dengan SAK ETAP, 3) Menarik kesimpulan tentang penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani.

Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa PT BPRS Puduarta Insani sudah menerapkan SAK ETAP dan kendala dalam menerapkan SAK ETAP tidak ada. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat	5
E. Batasan Istilah	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis	7
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah	7
2. SAK ETAP	8
3. Pengertian Laporan Keuangan	12
4. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	18
B. Kajian Terdahulu	35
C. Kerangka Teoritis	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Objek Penelitian	38
E. Data yang diperlukan	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
H. Sistematika Penulisan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah BPRS Puduarta Insani.....	41
2. Visi Dan Misi.....	42
3. Kepemilikan Saham	43
4. Struktur Organisasi	43
5. Produk - Produk PT BPRS Puduarta Insani.....	45
6. Prestasi PT BPRS Puduarta Insani.....	47
B. Pembahasan	
1. Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan	47
a. Neraca	48
b. Laporan Laba Rugi	49
c. Laporan Perubahan Ekuitas	50
d. Laporan Arus Kas	51
2. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan	52
3. Analisis Dari Perbandingan Laporan Keuangan.....	59
4. Kendala - kendala dalam penerapan SAK ETAP	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.¹

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP, contohnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) sesuai dengan edaran Bank Indonesia NO.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.²

Menurut OJK Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatan BPR jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan Bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan peransuransian. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

¹ Supami Wahyu Setiyowati, et. al., Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP (Jakarta, Mitra Wacana Media,2018). h. 46

² DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 1.

³ Syariah Bank.Com, Apa Itu BPRS?, Diakses Dari <https://www.Syariahbank.Com/Apa-Itu-Bank-Perkreditan-Rakyat-Syariah-Bprs/>. Pada Tanggal 26 Sempتمبر 2018.

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut DSAK-IAI selain mengeluarkan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60, juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK ETAP.

Diharapkan dengan menerapkan SAK ETAP, BPRS dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit untuk mendapatkan opini audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. Standar akuntansi keuangan ini lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Dengan telah diberlakukannya SAK ETAP di BPRS masih terdapat kekhawatiran terkait dengan penerapan dalam penyajian laporan keuangan karena adanya pengaruh dari regulator lain yang ikut berperan dalam penyajian laporan keuangan.

Penerapan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60 bagi BPRS selain tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS juga memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS.

DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan

lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Untuk menerapkan SAK ETAP dalam proses pelaporan keuangan tentu memerlukan pemahaman yang cukup bagi BPRS tersebut. Jika BPR tidak memahami perbedaan-perbedaan akibat perubahan standar pelaporannya maka informasi dalam laporan keuangannya tidak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arma Yuliza skripsi yang berjudul analisis pemahaman terhadap penerapan SAK ETAP pada BPR di kota Pasir Pengaraian menyimpulkan bahwa tidak semua BPR memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap SAK ETAP.⁵

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Dengan telah diberlakukannya SAK ETAP di BPRS masih terdapat kekhawatiran terkait dengan penerapan dalam penyajian laporan keuangan karena adanya pengaruh dari regulator lain yang ikut berperan dalam penyajian laporan keuangan.
2. Tidak semua BPR memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap SAK ETAP, yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak bermanfaat bagi pengguna. Dan hal ini bertentangan dengan SAK ETAP tentang Konsep dan Prinsip Pervasif.

⁴ OJK, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Point 2-7, Diakses Di [Http://www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) Pada Tanggal 25 September 2018.

⁵ Arma Yuliza, Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK ETAP Pada BPR Di Kota Pasir Pengaraian, Diakses Di [Https://Media.Neliti.Com](https://Media.Neliti.Com), Pada Tanggal 8 Oktober 2018.

C. Perumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ?
2. Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani.

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) khususnya penerapan SAK ETAP.

b. Bagi Pembaca

Memberi manfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi tentang penerapan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) kedalam laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

c. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Untuk memberikan masukan dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

d. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat membantu pihak-pihak yang membentuhkan.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan merupakan alat pokok yang secara formal digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan.⁶
2. Entitas adalah sebuah lembaga atau organisasi yang melaksanakan aktivitas bisnis (layanan) untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi berorientasi pada laba atau bukan laba).
3. SAK-ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada PSAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UKM, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.⁷
4. ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

⁶ Supami Wahyu Setiyowati, et, al., Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP (Jakarta, Mitra Wacana Media,2018) h. 6.

⁷ Ibid h.44

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syari'ah dan bank Pembiayaan rakyat syari'ah. Bank umum syari'ah merupakan bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸ Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang BPRS pasal 2, BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Pasal 4, BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan. Dan pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya Warga Negara Indonesia,
- b. Pemerintah daerah, atau
- c. Dua pihak atau lebih

Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, diajukan sebagai calon PSP BPRS, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.⁹

⁸ Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015) h. 44

⁹ OJK, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK No 3/POJK.03/2016 Pasal 2-5, Diakses Di [Http://www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id), Pada Tanggal 26 September 2018.

2. SAK ETAP

ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sebagaimana ditentukan bahwa SAK ETAP merupakan adopsi dari IFRS for SME. SAK ETAP dipergunakan untuk perusahaan yang belum *go public*, bukan fidusia (bank, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya), dikecualikan oleh otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia mengharuskan BPR menggunakan SAK ETAP dan bukan SAK IFRS.¹⁰

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau; b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP berlaku efektif sejak 1 januari 2011 dan penerapan dini diperkenankan.¹¹

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi penggunaan mengizinkan penggunaan SAK ETAP, contohnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) sesuai dengan edaran Bank Indonesia NO. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

¹⁰ Sirius Sitanggang, et, al, Panduan Akuntansi Keuangan Bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017) h. 3

¹¹ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016), H.ETAP 1

Standar ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam standar ETAP adalah sebagai berikut : a. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca; b. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi nilai wajar; c. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.¹²

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP, penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

Standar ini efektif dapat digunakan untuk laporan keuangan tahun 2009, Entitas yang memenuhi kriteria menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap menggunakan PSAK maka pada tahun berikutnya harus konsisten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah menggunakan SAK ETAP.¹³

SAK ETAP menggunakan prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif. Pervasif berarti dalam hal tidak ada pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk suatu transaksi atau peristiwa maka entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Persyaratan untuk pengakuan, dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan.¹⁴

¹² Supami Wahyu Setiyowati, et, al., Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP (Jakarta, Mitra Wacana Media,2018). h 12

¹³ Sochib, Pengantar Akuntansi, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018), h. 52

¹⁴ Syaiful Bahri, Pengantar Akuntansi, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2016) h. 155

a. Perbedaan SAK ETAP dengan SAK Umum (IFRS)

Tabel 2.1 Perbedaan SAK ETAP Dan SAK Umum (IFRS)

No.	Keterangan	SAK ETAP	SAK Umum (IFRS)
1	Laporan keuangan	a) Neraca	a) Laporan posisi keuangan
		b) Laporan laba rugi	b) Laporan laba rugi dan penghasilan
		c) Laporan perubahan ekuitas	c) Laporan perubahan ekuitas
		d) Laporan arus kas	d) Laporan arus kas
		e) Catatan atas laporan keuangan	e) Catatan atas laporan keuangan
2	Laporan laba rugi Dan laporan Perubahan ekuitas	Dapat digantikan dengan laporan laba rugi dan saldo laba pada kondisi tertentu	Tidak ada alternatif lain untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas
3	Metode penyusunan arus kas dari kegiatan operasi	Metode tidak langsung	Metode langsung dan metode tidak langsung
4	Keuntungan belum direalisasi dari kategori investasi tersedia untuk dijual	Disajikan di ekuitas	Disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain
5	Investasi pada asosiasi	Diukur menggunakan metode biaya	Diukur menggunakan metode ekuitas
6	Investasi pada entitas anak	Diukur menggunakan metode ekuitas, tidak dikonsolidasi	Konsolidasi
7	Aset tetap	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah	Alternatif metode : Pengukuran : a) Metode biaya perolehan b) Metode nilai wajar
8	Properti investasi	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan	Alternatif metode : Pengukuran : a) Metode biaya perolehan b) Metode nilai wajar

		Pemerintah	
9	Aset tak berwujud	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan	Alternatif metode : Pengukuran : a) Metode biaya perolehan b) Metode revaluasi
10	Kriteria pengakuan Sewa pembiayaan	Salah satu dari : a) Sewa mengalihkan Kepemilikan aset kepada lessee diakhir masa sewa b) <i>Lessee</i> memiliki opsi beli pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajarnya c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset yaitu satu atau lebih dari 75% umur ekonomis aset d) Pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa secara minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan atau aset sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset e) Aset sewaan bersifat khusus, dimana hanya lessee yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material	Kriteria bersifat <i>principle based</i> , jika telah terjadi transfer dan benefit dari <i>lessor</i> kepada <i>lessee</i>
11	Kapitalisasi biaya pinjaman	Tidak diperkenankan, semua dibebankan sebagai beban bunga	Diperkenankan
12	Pajak penghasilan	Tidak mengakui pajak tangguhan	Mengakui pajak tangguhan

b. Ruang lingkup SAK ETAP

Paragraf 1.1, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan ; dan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general porpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Paragraf 1.2, Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal ; atau
- 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Paragraf 1.3, Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. ¹⁵

3. Pengertian Laporan Keuangan

Bagian ini membahas bagian umum laporan keuangan yaitu defenisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dalam laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan unsur-unsur dalam laporan keuangan.

¹⁵ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 1.

a. Defenisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat pokok yang secara formal digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang disediakan untuk para pemakai yang bervariasi, seperti pemegang saham, kreditur, pemasok, karyawan dan pemerintah.

Laporan keuangan ini digunakan oleh para pemakai untuk lebih memahami posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Dipandang dari sisi biaya dan manfaat laporan keuangan yang bertujuan umum akan menyediakan informasi yang sangat bermanfaat dengan biaya yang rendah.¹⁶

Penyusunan laporan keuangan dihasilkan dari proses penerapan konsep-konsep akuntansi. Sistem pencatatan ditampung dalam sebuah pos yang disebut akun. Suatu akun tertentu akan digunakan sesuai dengan jenis transaksinya. Selanjutnya, akun dikelompokkan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dianalisis dikemudian hari. Dengan akuntansi, dapat dibedakan akun mana yang sebaiknya dikelompokkan. Analisis selain dibuat berdasarkan mutasi saldo akun bisa juga dari kelompoknya. Dengan demikian, analisis suatu pencatatan bisa dilakukan lebih jelas.¹⁷

¹⁶ Peni R. Pramono, *Membedah Laporan Keuangan Sangat Mudah*, (Jakarta, PT Elex Media Kompotindo, 2017) h. 21

¹⁷Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014), h. 7

b. Tujuan Dan Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Paragraf 2.1, Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan

1) Dapat Dipahami

Paragraf 2.2, Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh penggunanya. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2) Relevan

Paragraf 2.3, Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3) Materialitas

Paragraf 2.4, Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau

kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4) Keandalan

Paragraf 2.5, Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5) Subtansi Mengungguli Bentuk

Paragraf 2.6, Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6) Pertimbangan Sehat

Paragraf 2.7, Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7) Kelengkapan

Paragraf 2.8, Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan

dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan

Paragraf 2.9, Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9) Tepat Waktu

Paragraf 2.10, Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10) Keseimbangan Antara Biaya Dan Manfaat

Paragraf 2.11, Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas

harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.¹⁸

c. Pengakuan Dan Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Paragraf 2.24, Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas ; dan
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Paragraf 2.25, Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan.

Paragraf 2.26, Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu pada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan pada saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan kelompok dari suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual.

Paragraf 2.27, Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.

¹⁸ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h. Etap 3-5

Paragraf 2.28, Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui dimasa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Paragraf 2.29, Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan.

Paragraf 2.30, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Paragraf 2.31, Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :

- 1) Biaya historis.

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- 2) Nilai wajar

Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

Paragraf 2.33, Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi defenisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

Paragraf 2.34, Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin

mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Paragraf 2.35, Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Paragraf 2.36, Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Paragraf 2.37, Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui didalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Paragraf 2.38, Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

Paragraf 2.39, SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan "*matching concept*".¹⁹

4. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Paragraf 3.2, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*.

¹⁹ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016), h.ETAP 7-9

Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Paragraf 3.3, Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

Paragraf 3.4, Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

Paragraf 3.5, Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- 1) Fakta tersebut;
- 2) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek dan ;
- 3) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

Paragraf 3.6, Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan, atau ;
- 2) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Paragraf 3.7, Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- 1) Sifat reklasifikasi;
- 2) Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- 3) Alasan reklasifikasi.

Paragraf 3.8, Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- 1) Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- 2) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

Paragraf 3.9, Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan

informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Paragraf 3.10, Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Paragraf 3.11, Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

Paragraf 3.12, Laporan keuangan entitas meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi;
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Paragraf 3.13, Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

Paragraf 3.14, Karena paragraf 3.9 mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus

menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Paragraf 3.15, Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama.

Paragraf 3.16, Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- 1) Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- 2) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- 3) Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 dalam SAK ETAP tentang Mata Uang Pelaporan;
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Paragraf 3.17, Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

- 1) Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
- 2) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.²⁰

²⁰ DSAK IAI, SAK ETAP, (Jakarta, IAI, 2016) h. ETAP 11-13

Laporan keuangan entitas berdasarkan SAK ETAP :

a. Neraca

Paragraf 4.1, mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan.

Paragraf 4.2, Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti investasi
- 5) Aset tetap
- 6) Aset tidak berwujud
- 7) Utang usaha dan utang lainnya
- 8) Aset dan kewajiban pajak
- 9) Kewajiban diestimasi
- 10) Ekuitas

Paragraf 4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.

Paragraf 4.4, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Paragraf 4.5, Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9 dalam SAK ETAP, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Paragraf 4.6, Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan;

- 3) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Paragraf 4.7, Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Paragraf 4.8, Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika :

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas ;
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan ;
- 3) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Paragraf 4.9, Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Paragraf 4.10, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan :

- 1) Pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian yang terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas ; dan
- 2) Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas

dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan.

Paragraf 4.11, Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian :

- 1) Sifat dan likuiditas aset ;
- 2) Fungsi aset dalam entitas ; dan
- 3) Jumlah, sifat dan waktu kewajiban.

Paragraf 4.12, Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan :

- 1) Kelompok aset tetap
- 2) Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;
- 3) Persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari :
 - a) Persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
 - b) Persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;
 - c) Bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
- 4) Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;
- 5) Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas.

Paragraf 4.13, Entitas yang berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan:

- 1) Untuk setiap kelompok modal saham :
 - a) Jumlah saham modal dasar;
 - b) Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
 - c) Nilai nominal saham;
 - d) Ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;

- e) Hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen pembayaran kembali atas modal;
- f) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

Paragraf 4.14, Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti disyaratkan dalam paragraf 4.13 a, yang menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas.²¹

b. Laporan Laba Rugi

Paragraf 5.1, ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Paragraf 5.2, Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat *bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan*).

²¹ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 15-17

Paragraf 5.3, Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Beban keuangan;
- 3) Bagian laba dan rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- 4) Beban pajak;
- 5) Laba atau rugi neto.

Paragraf 5.4, Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Paragraf 5.5, Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 5.6, Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Analisis menggunakan sifat beban :

- 1) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Misalnya :

Pendapatan		x
Pendapatan operasi lain		x
Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses		x
Bahan baku yang digunakan		x
Beban pegawai		x
Beban penyusutan dan amortisasi		x
Beban operasi lainnya		<u>x</u>

Jumlah beban operasi	<u>(x)</u>
Laba operasi	<u>x</u>

Analisis menggunakan fungsi beban :

- 1) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misalnya :

Pendapatan	x
Beban pokok penjualan	<u>(x)</u>
Laba bruto	x
Pendapatan operasi lainnya	x
Beban pemasaran	(x)
Beban umum dan administrasi	(x)
Beban operasi lain	<u>(x)</u>
Laba operasi	<u>x</u>

Paragraf 5.7, Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.

Paragraf 5.8, Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.²²

²² DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 19-20

c. Laporan Perubahan Ekuitas Dan Laporan Laba Rugi Dan Saldo Laba

Paragraf 6.1, mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu).

Paragraf 6.2, Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Paragraf 6.3, Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- 1) Laba atau rugi untuk periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai bab 9 *kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan* dalam SAK ETAP.
- 4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari :
 - a) Laba atau rugi
 - b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Paragraf 6.4, Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Paragraf 6.5, Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 dalam SAK ETAP tentang *Laporan Laba Rugi* :

- 1) Saldo laba pada awal periode pelaporan
- 2) Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode
- 3) Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu
- 4) Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan
- 5) Saldo laba pada akhir periode pelaporan.²³

d. Laporan Arus Kas

Paragraf 7.1, mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan *historis* atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan terjadi selama satu periode dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.2, Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi dan lainnya. Oleh karena itu, investasi pada umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik

²³ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 21-22

sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Paragraf 7.3, Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Paragraf 7.4, Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu arus kas pada umumnya berasal dari investasi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

- 1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- 2) Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain
- 3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- 4) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- 5) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- 6) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksud untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi seperti penjualan, peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

Paragraf 7.5, Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- 1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya ;
- 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya ;
- 3) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)
- 4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- 5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- 6) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Paragraf 7.6, Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain
- 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya
- 4) Pelunasan pinjaman
- 5) Pembayaran kas oleh *lessee* atau untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Paragraf 7.7, Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Paragraf 7.8, Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dampak dari :

- 1) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan
- 2) Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Paragraf 7.9, Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

Paragraf 7.10, Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.

Paragraf 7.11, Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau investasi.

Paragraf 7.12, Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi.

Paragraf 7.13, Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Paragraf 7.14, Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

Paragraf 7.15, Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi nonkas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi nonkas adalah :

- 1) Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan
- 2) Akuisisi suatu entitas melalui sewa pembiayaan
- 3) Konversi utang menjadi modal.

Paragraf 7.16, Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Paragraf 7.17, Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.²⁴

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Paragraf 8.1, mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

²⁴ DSAK IAI Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 23-25

Paragraf 8.2, Catatan atas laporan keuangan harus :

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai paragraf 8.5 dan 8.6 dalam SAK ETAP
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.3, Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 8.4, Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3)
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5)
- 3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 4) Pengungkapan lain.

Paragraf 8.5, Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan :

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- 2) Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.6, Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya

yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.7, Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang :

- 1) Sifat , dan ;
- 2) Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. ²⁵

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Singgih Widy Prasetyo, membahas mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi. Terdapat beberapa analisis yang dilakukan mulai dari penyajian, dasar pengukuran, sampai metode yang digunakan oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Dan kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil analisis membandingkan 2 koperasi secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara koperasi yang nilai aset nya tinggi dan koperasi yang nilai aset nya rendah dalam menerapkan SAK ETAP. ²⁶

²⁵ DSAK IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) h. ETAP 27-28

²⁶ Singgih Widy Prasetyo, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kota Bandar Lampung), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung, 2017.

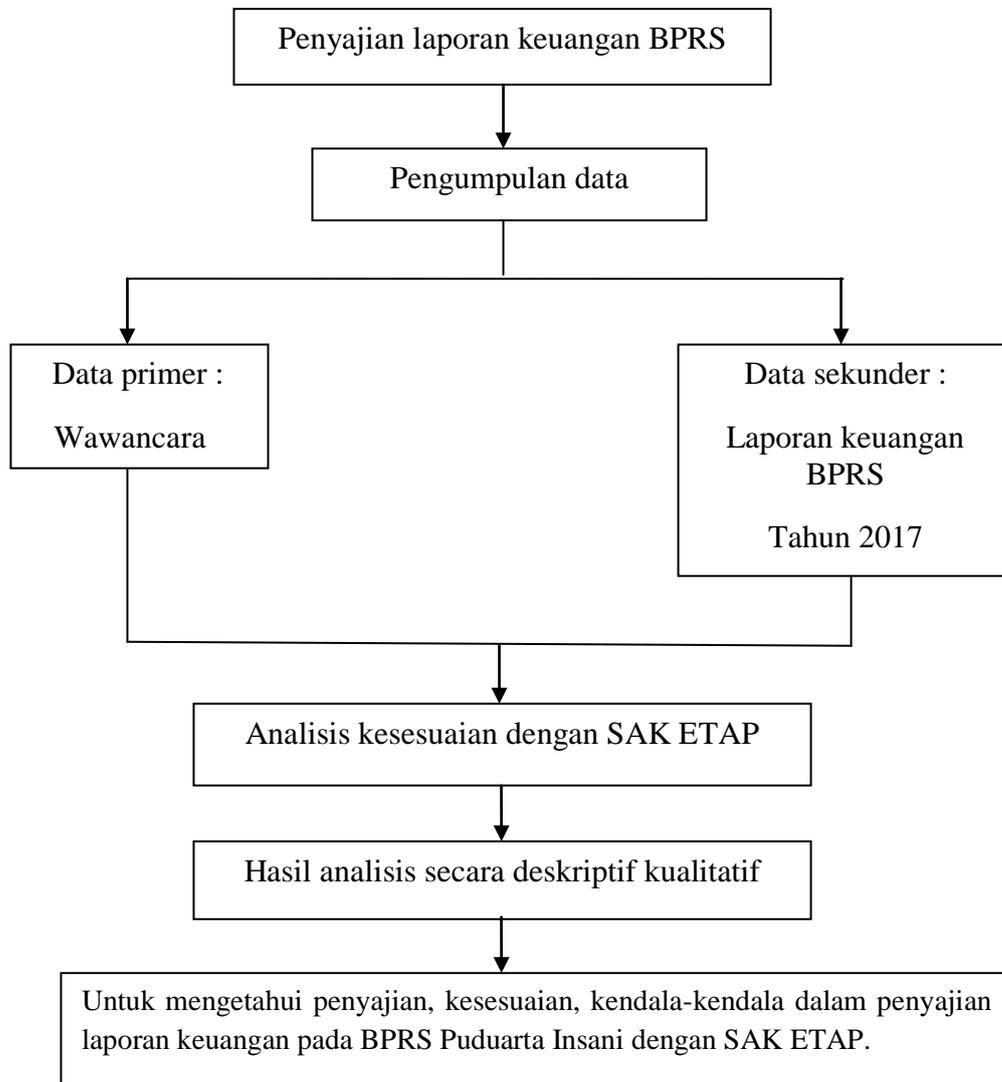
2. Skripsi Indah Sari, membahas mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan di Koperasi Karpeda PTPN II Tanjung Morawa dengan SAK ETAP. Dan hasil penelitian skripsi tersebut adalah laporan keuangan koperasi karpeda PTPN II Tanjung Morawa sudah sesuai dengan SAK ETAP untuk neraca keuangan, perhitungan laba rugi, dan CALK. Berdasarkan hasil persentase sebesar 26,67% tidak sesuai dengan SAK ETAP, hal ini disebabkan koperasi tidak memenuhi unsur kelengkapan laporan keuangan, yaitu tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.²⁷
3. Jurnal yang dibuat oleh, Jovan R. Tamon, membahas mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (2009), diperoleh kesimpulan bahwa, dalam penyajian laporan keuangan PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado masih terdapat banyak ketidak sesuaian dengan SAK ETAP (2009).²⁸

²⁷ Suci Indah Sari, Penerapan SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Koperasi Kaperda PTPN II Tanjung Morawa), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

²⁸ Jovan R. Tamon, Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. BPR Cipta Cemerlang (CCI) Manado, Jurnal, Vol. 16, No. 04, 2017.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian.²⁹ Untuk memberikan gambaran tentang pemikiran peneliti, maka akan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

²⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta, Grasindo, 2016), h. 27

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan pada objek tertentu yaitu terhadap data perusahaan. Selanjutnya dari data yang dianalisis ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil sebatas pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menguraikan temuannya berdasarkan orientasi ideologis atau perspektif. Berbagai penjelasan ditujukan untuk pengonfirmasian dan penguraian teoritis atau ideologis.³⁰ Serta kesimpulan yang di ambil diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan melalui metode penelitian.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Puduarta Insani yang beralamatkan di Jl. Besar Tembung No. 13 A, Deli Serdang, Sumatera Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian yang berhubungan dalam laporan keuangan BPRS. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian akuntansi.

³⁰ Setiawan Santana, K., Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007) h. 137.

D. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Menurut Supranto (2000), objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Adapun obyek penelitian yang penulis teliti adalah laporan keuangan tahunan PT BPRS Puduarta Insani tahun 2017.

E. Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum perusahaan
2. Struktur organisasi
3. Laporan keuangan tahun 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Riset lapangan (*field research*)
Wawancara langsung dengan para karyawan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pencatatan keuangan perusahaan.
2. Observasi
Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
3. Dokumentasi
Mengumpulkan data melalui catatan dan dokumen perusahaan.³²

³¹ Muh Fitrah, Metodologi Penelitian, (Sukabumi, Cv Jejak, 2017), h. 156.

³² M. Muchson, Metode Riset Akuntansi, (Jakarta, Spasi Media, 2017), h. 58

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif – Komparatif, yaitu metode analisis yang digunakan dengan membandingkan teori-teori dengan praktik yang terjadi didalam perusahaan, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Memaparkan penyajian laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Puduarta Insani tahun 2017 yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Mengamati, membandingkan, dan menganalisis penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani menurut SAK ETAP untuk melihat kesesuaian. Penyajian laporan keuangan perusahaan dianalisis dan dideskripsikan, kemudian dibandingkan dengan SAK ETAP.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian akan lebih mudah diketahui jika diperoleh gambaran dari keseluruhan sistematika penulisan, berikut ini akan diuraikan tahap-tahap pembahasannya, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Batasan Istilah.

³³ M. Hariwijaya, Metodologi Dan Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi, (Jakarta, Diandra Kreatif, 2017) h. 53

Bab II Kajian Teori, bagian ini berisi kajian teoritis yang menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah. teori-teori yang digunakan diambil dari buku, jurnal, Serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Bab III Berisi Metode Penelitian . Pada Bab ini menjelaskan Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, Data Yang Diperlukan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Bab IV Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini berisi hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab V Berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi, Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 40 orang setiap angkatan. Pada saat itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani (selanjutnya disingkat BPRS) beralamat di Jl. Besar Tembung No. 13 A Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. BPRS mulai beroperasi tanggal 18 Juni 1996. Peresmian operasionalnya ketika itu dilakukan oleh SEKWILDASU H. A. Wahab Dalimunthe, SH (mewakili Gubernur Sumatera Utara). Nomor sandi BPRS adalah 60.441.1.

Modal dasar BPRS sesuai Akte No. 13 tanggal 23 Mei 2007 adalah Rp. 5 miliar, dan telah disetor sebesar Rp. 3.345.755 ribu, dengan komposisi kepemilikan terdiri dari: UIN Sumatera Utara (30,82%), BAZNAZ Sumatera Utara (21,37%), Hj. Sariani Amiraden Siregar (13,12%) Dr. H. Maratua Simanjuntak (12,33%) dan masyarakat (22,36%).

PT BPRS Puduarta Insani saat ini dipimpin oleh Mailiswarti, SE.,MA selaku Direktur Utama, Marwan Siregar selaku Direktur, Dewan Komisaris terdiri dari: Dr. H. Maratua Simanjuntak (Komisaris Utama), Dr. H. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., MA. (Anggota), Dewan Pengawas Syariah terdiri dari: Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA (Ketua), dan Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag (Anggota).

Karyawan PT BPRS Puduarta Insani saat ini terdiri dari: 2 orang Direksi, 1 orang Kepala Cabang, 2 orang Supervisor dan 8 orang karyawan tetap, 6 orang karyawan kontrak, serta 5 orang karyawan non-administrasi, yaitu seorang petugas kebersihan, dan 2 orang penjaga kantor ditambah 1 orang Satpam dan 1 orang Office Boy dari perusahaan outsourcing PT CNM.

Jaringan kantor PT BPRS Puduarta Insani sampai akhir Desember 2011 terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat di Jl. Besar Tembung No. 13 A, dan 1 (satu) Kantor Cabang di Kampus IAIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate. Kantor cabang ini beroperasi tanggal 01 Juli 2011.

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip syariah secara murni
- 2) Melayani secara profesional
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

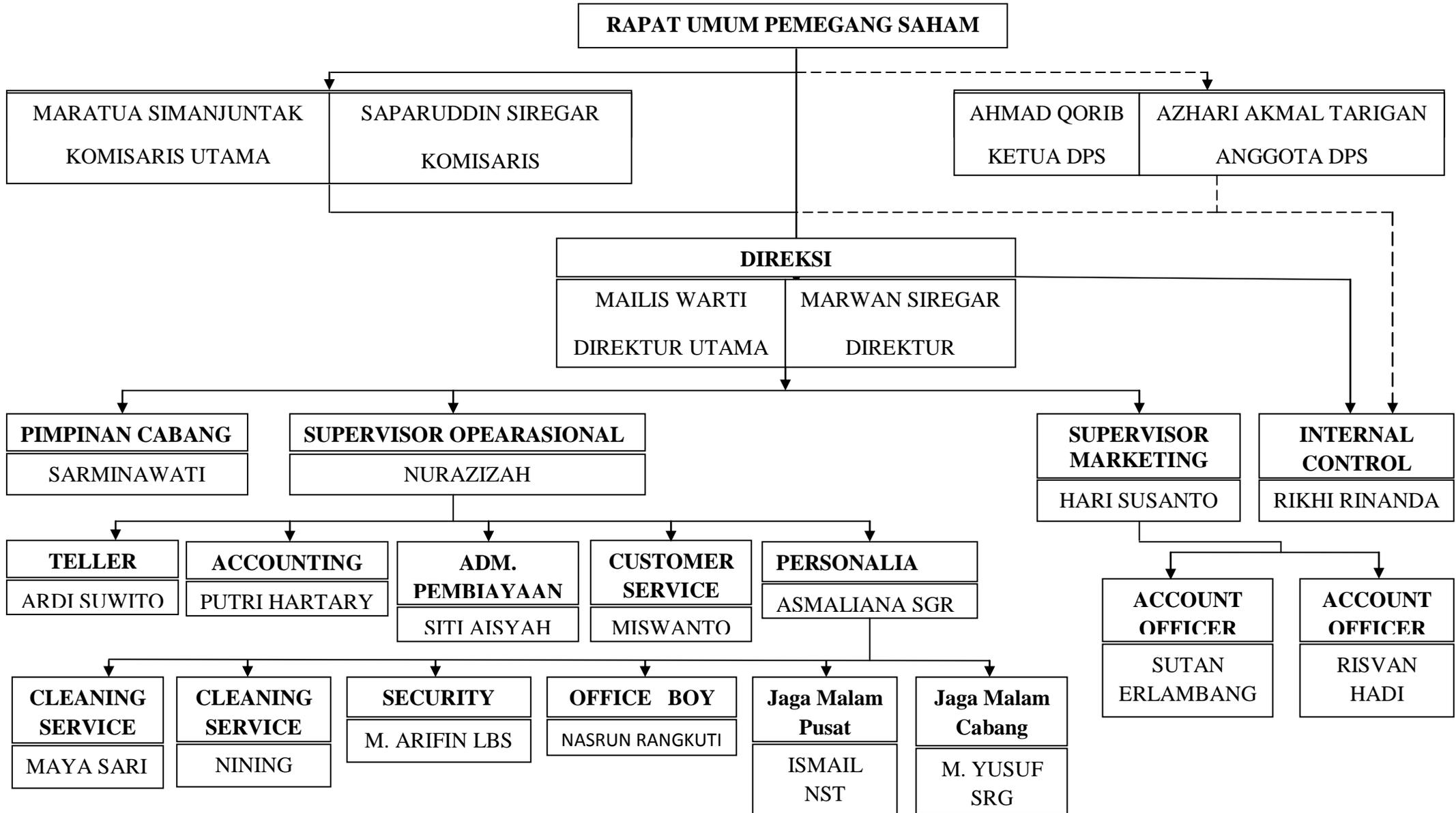
3. Kepemilikan Saham

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1) UIN Sumatera Utara | : 30,82 % |
| 2) BAZNAS Sumatera Utara | : 21,37 % |
| 3) Hj. Sariani Amiraden Siregar | : 13,12 % |
| 4) Dr. H. Maratua Simanjuntak | : 12,33 % |
| 5) Masyarakat | : 22,36 % |

4. Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan demikian, jelas bahwa penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dibawah ini adalah gambar struktur organisasi PT BPRS Puduarta Insani.

STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS PUDUARTA INSANI



5. Produk-produk PT BPRS Puduarta Insani

a. Penghimpunan Dana

1) Tabungan wadi'ah

Produk tabungan di BPRS Puduarta Insani diberi nama Tabungan wadi'ah Insani. Tabungan ini sesuai dengan prinsip wadi'ah. Nasabah mempercayakan dananya disimpan di bank dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (on call) atau berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat awal akad.

Tabungan wadi'ah Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 02/ DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan.

2) Deposito Mudharabah

Deposito pada BPRS Puduarta Insani diberi nama Deposito Mudharabah Puduarta Insani dimana deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada Bank sebagai *mudharib* (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan Fatwa DSN. Deposito Mudharabah BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito,

b. Penyaluran Dana

1) Jual beli Murabahah

Jual beli Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani adalah bentuk penyaluran dana dengan pola jual beli. Dengan pola jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada Bank. Bank selaku penjual dan nasabah selaku calon pembeli bermufakat untuk menetapkan harga yang disepakati atas barang yang dibutuhkan nasabah sesuai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan nasabah. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menyerahkannya kepada nasabah. Selanjutnya nasabah akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai *schedule* yang ditetapkan.

Murabahah dapat juga dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Penyaluran dana dengan pola murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

2) Ijarah

Ijarah disebut juga akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

- a) Objek sewa : properti, alat transportasi, alat - alat berat, multi jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dll).
- b) Sewa : nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan, besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase, besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan, apabila objek sewa bukan milik bank, maka pendapatan bank merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.

3) Al-Qardh

Pembiayaan Al-Qardh adalah penyediaan dana dalam bentuk tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi pinjam - meminjam dalama akad Al-Qardh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajibannya sesuai dengan akad.

6. Prestasi PT BPRS Puduarta Insani

- a. Penghargaan atas kinerja keuangan selama tahun 2014 dengan predikat sangat bagus.
- b. Penghargaan atas kinerja keuangan selama tahun 2016 dengan predikat syari'ah yang sangat bagus.
- c. Penghargaan atas kinerja keuangan selama tahun 2017 dengan predikat syari'ah yang sangat bagus.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran singkat penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani

Dalam melakukan analisis data, penulis mengambil data BPRS Puduarta Insani yang beralamatkan di Jl. Besar Tembung No. 13 A, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dasar penelitian ini menggunakan data utama yaitu laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani tahun 2017. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Data ini akan dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam SAK ETAP sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani. Setelah dibandingkan, hasil perbandingan dari penyajian laporan keuangan tersebut akan dianalisis secara deskriptif. PT BPRS Puduarta Insani menyajikan format laporan keuangan diantaranya yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Berikut ini laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani :

a. Neraca

PT. BPRS PUDUARTA INSANI
NERACA
31 DESEMBER 2017 dan 2016

	Catatan	31 Desember 2017 Rp.	31 Desember 2016 Rp.
ASET			
Aset Lancar			
Kas	1	1,914,690,150	842,517,050
Penempatan Pada Bank Lain	2	12,629,428,694	11,508,613,029
Piutang	3	42,160,267,434	40,988,350,549
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4	(430,586,839)	(364,462,686)
Jumlah Aset Lancar		56,273,799,439	52,975,017,942
Aset Tetap			
Harga Perolehan	5	1,212,544,402	1,236,352,400
Akumulasi Penyusutan		(803,784,973)	(807,537,411)
Nilai Buku Aset Tetap		408,759,429	428,814,989
Rupa - Rupa Aset	6	461,082,941	404,981,604
JUMLAH ASET		57,143,641,809	53,808,814,535
PASSIVA			
Liabilitas			
Liabilitas Segera Dibayar	7	226,317,145	62,561,208
Tabungan Wadiah	8	14,497,983,873	11,572,651,096
Dana Investasi Tidak Terikat	9	29,341,091,760	24,424,974,815
Liabilitas Kepada Bank Lain	10	6,046,302,301	10,083,119,314
Pinjaman Diterima	11	833,316,000	1,833,324,000
Rupa - Rupa Passiva	12	720,446,082	1,146,682,691
Jumlah Liabilitas		51,665,457,161	49,123,313,124
Ekuitas			
Modal Disetor Yang Ditempatkan	13	3,345,755,000	2,767,960,000
Modal Pinjaman		-	-
Cadangan Umum		1,334,871,817	1,193,728,251
Laba Ditahan		-	-
Laba Tahun Berjalan		797,557,831	723,813,160
Jumlah Ekuitas		5,478,184,648	4,685,501,411
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		57,143,641,809	53,808,814,535

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

b. Laporan Laba Rugi

PT. BPRS PUDUARTA INSANI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
Pendapatan Operasional	14		
Bagi Hasil Pihak Ketiga Bukan Bank	a	6,945,507,326	7,090,457,820
Bagi Hasil Dari Bank - Bank Lain	b	674,759,574	336,149,328
Pendapatan Administrasi	c	13,432,568	13,117,250
Pendapatan Operasional Lainnya	d	262,398,581	368,992,142
Jumlah Pendapatan Operasional		7,896,098,049	7,808,716,540
Beban Operasional	15		
Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana	a	3,467,828,256	3,531,050,425
Beban Bonus Titipan Wadiah	b	156,989,958	200,884,903
Beban Premi Asuransi	c	114,895,360	105,194,485
Beban Tenaga Kerja	d	1,843,269,445	1,806,952,753
Beban Pendidikan dan Pelatihan	e	90,348,000	90,072,732
Beban Sewa	f	196,004,584	157,773,068
Beban Promosi	g	21,708,356	18,102,240
Pajak-Pajak (tidak termasuk PPh)	h	13,924,595	10,512,750
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva tetap	i	36,814,140	39,496,119
Beban Penyusutan, Penyisihan & Amortisasi	j	434,644,578	467,624,773
Beban Barang dan Jasa	k	507,816,866	573,836,473
Beban Lainnya	l	25,850,019	24,938,794
Jumlah Beban Operasional		6,910,094,157	7,026,439,515
Laba Operasional		986,003,892	782,277,025
Pendapatan Non Operasional	16		
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aktiva Tetap	a	-	120,540,000
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aktiva Tetap			-
Pendapatan Non Operasional Lainnya	b	1,494,000	285,600
Jumlah (Kerugian) Pendapatan Non Operasional		1,494,000	120,825,600
Beban Non Operasional	17	(19,394,239)	(23,949,922)
Laba (Rugi) Non Operasional		(17,900,239)	96,875,678
Jumlah Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		968,103,653	879,152,703
Taksiran Pajak Penghasilan	18	(170,545,822)	(155,339,543)
Laba Bersih		797,557,831	723,813,160

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

c. Laporan Perubahan Ekuitas

PT. BPRS PUDUARTA INSANI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	31 Desember 2017 Rp.	31 Desember 2016 Rp.
Modal Saham		
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	3,345,755,000	2,767,960,000
Tambahkan Modal Disetor	-	-
Modal Pinjaman	-	-
Jumlah Modal Saham	<u>3,345,755,000</u>	<u>2,767,960,000</u>
Cadangan Umum	1,334,871,817	1,193,728,251
Jumlah Cadangan Umum	<u>1,334,871,817</u>	<u>1,193,728,251</u>
Laba Ditahan		
Laba Ditahan	-	-
Pembagian Deviden	-	-
Laba Tahun Berjalan	797,557,831	723,813,160
Jumlah Laba Ditahan	<u>797,557,831</u>	<u>723,813,160</u>
Jumlah Ekuitas	<u>5,478,184,648</u>	<u>4,685,501,411</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

d. Laporan Arus Kas

PT. BPRS PUDUARTA INSANI
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	31 Desember 2017 Rp.	31 Desember 2016 Rp.
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Laba Tahun Berjalan	797,557,831	723,813,160
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih		
Menjadi Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi :		
Penyusutan Aktiva Tetap	(3,752,439)	(25,116,197)
Amortisasi Beban Ditangguhkan		
Penyisihan Aktiva Produktif	66,124,153	30,131,142
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Operasional :		
Penempatan Pada Bank Lain	(1,120,815,665)	(1,702,071,542)
Piutang	(1,171,916,885)	(1,883,144,263)
Rupa - Rupa Aktiva	(56,101,337)	(51,672,970)
Kenalkan (Penurunan) Kewajiban Operasional :		
Kewajiban Segera Dibayar	163,755,937	13,834,741
Tabungan Wadiah	2,925,332,777	3,365,541,122
Dana Investasi Tidak Terikat	4,916,116,946	674,380,611
Kewajiban Pada Bank Lain	(4,036,817,013)	123,711,167
Pinjaman Diterima	(1,000,008,000)	(1,000,008,000)
Rupa-Rupa Passiva	(426,236,609)	271,542,659
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1,053,239,696	540,941,629
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Aktiva Tetap	23,807,998	4,703,000
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Modal Disetor	577,795,000	-
Modal Pinjaman	-	-
Cadangan Umum	141,143,566	118,070,315
Pembagian Dividen dari Laba tahun lalu	-	-
Laba Ditahan Tahun Lalu	(723,813,160)	(605,488,795)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(4,874,594)	(487,418,480)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	1,072,173,100	58,226,149
Kas dan Setara Kas Awal Periode	842,517,050	784,290,900
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	1,914,690,150	842,517,050

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2. Perbandingan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dengan penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani.

SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Namun, regulator dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan menggunakan SAK ETAP. Kebijakan Bank Indonesia yang mengizinkan BPRS untuk menerapkan SAK ETAP merupakan hal yang harus didukung sehingga penerapan SAK ETAP bagi BPRS dapat berjalan dengan baik. Pedoman akuntansi BPRS merupakan penjabaran lebih lanjut terkait pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPRS dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa komparatif atau analisa perbandingan dengan cara membandingkan penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani dengan SAK ETAP.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dengan penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani.

**Tabel 4.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP Dengan Penyajian Laporan Keuangan
PT BPRS Puduarta Insani**

No	Item Yang Diperbandingkan	SAK ETAP	Paragraf	PT BPRS Puduarta Insani	Keterangan
A. Neraca					
1	Dasar Pencatatan	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual	2.33	Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual	Sesuai
2	Aset	Aset minimal menyajikan pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud	4.2	Pos - pos aset yang disajikan oleh BPRS : a. Kas b. Penempatan pada bank lain c. Piutang d. Aset tetap e. Rupa - rupa aset	Sesuai
3	Kewajiban	Kewajiban minimal menyajikan pos-pos meliputi : a. Utang usaha dan utang lainnya b. Aset dan kewajiban pajak c. Kewajiban diestimasi	4.2	Kewajiban menyajikan pos -pos : a. Liabilitas segera dibayar b. Tabungan wadiah	Sesuai

				<ul style="list-style-type: none"> c. Dana investasi tidak terikat d. Liabilitas kepada bank lain e. Pinjaman diterima f. Rupa - rupa passiva 	
4	Ekuitas	Entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya	4.3	<ul style="list-style-type: none"> a. Modal disetor yang ditempatkan. b. Modal pinjaman c. Cadangan umum d. Laba ditahan e. Laba tahun berjalan 	Sesuai
5	Klasifikasi aset dan kewajiban	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan	4.5	Entitas menyajikan aset dan kewajiban sebagai satu klasifikasi tidak terpisah dalam neraca, namun penyajian berdasarkan likuiditas dapat memberikan	Sesuai, meskipun aset dan kewajiban tidak diklasifikasi-kan secara

		informasi andal dan lebih relevan		informasi yang andal dan relevan.	terpisah
6	Informasi yang disajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan	Entitas menyajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi atas pos yang disajikan : a. Kelompok aset tetap b. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban di estimasi lainnya c. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, dan saldo laba	4.12	a. Aset tetap b. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya seperti kewajiban segera dan kewajiban lain c. Kelompok ekuitas diantaranya modal disetor, modal pinjaman, saldo laba	Sesuai
B. Laporan Laba Rugi					
1	Informasi yang disajikan	Laporan laba rugi minimal menyajikan pos-pos berikut : a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Bagian laba atau rugi dari	5.3	Laporan laba/rugi menyajikan pos-pos : a. Pendapatan dan beban operasional b. Pendapatan dan beban	Sesuai, meskipun terdapat perbedaan nama akun

		<p>investasi yang menggunakan metode ekuitas</p> <p>d. Beban pajak</p> <p>e. Laba atau rugi neto</p>		<p>non-operasional</p> <p>c. Beban pajak</p> <p>d. Laba (Rugi) neto</p>	<p>yaitu beban keuangan menjadi beban operasional dan beban non-operasional</p>
	Informasi yang disajikan	Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.	5.4	Entitas menyajikan pos, judul, dan sub judul lainnya.	Sesuai
C. Laporan Perubahan Ekuitas					
1	Informasi yang disajikan	<p>Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :</p> <p>a. Laba atau rugi periode</p> <p>b. Pendapatan dan beban yang</p>	6.3	Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi, dan pendapatan dan beban yang disajikan langsung dalam ekuitas, seperti :	Sesuai

		disajikan langsung dalam ekuitas		penambahan modal dan pembagian dividen	
D. Laporan Arus Kas					
1	Penyajian laporan arus kas	Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan	7.3	Entitas menyajikan laporan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.	Sesuai
2	Aktivitas Operasi	Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas	7.4	Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari pelunasan piutang, penempatan pada bank lain, dan rupa-rupa aktiva	Sesuai
3	Aktivitas Investasi	Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa	7.5	Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas dengan tujuan memperoleh pendapatan dan arus kas	Sesuai

		depan		masa depan yaitu pembelian / penjualan aktiva tetap	
4	Aktivitas Pendanaan	Arus kas dapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan pelunasan pinjaman	7.6	Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan / pembayaran modal pinjaman dan pembagian dividen	Sesuai
E. Catatan Atas Laporan Keuangan					
1	Struktur	Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan : a. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan b. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan c. Pengungkapan lain	8.4	Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani : a. Gambaran umum b. Ikhtisar kebijakan akuntansi c. Penjelasan pos-pos neraca d. Lampiran	Sesuai

3. Analisis dari perbandingan laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani dengan laporan keuangan menurut SAK ETAP

a. Neraca

Secara umum penyajian laporan keuangan pada komponen neraca sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP. Neraca PT BPRS Puduarta Insani menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam SAK ETAP yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu yaitu bulan Desember yang diakui sebagai akhir periode pelaporan.

Berikut merupakan penjelasan komponen dari neraca :

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP Paragraf 2.12). Aset diakui dalam neraca karena manfaat ekonominya di masa depan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Entitas belum sesuai yaitu PT BPRS Puduarta Insani tidak mengklasifikasikan secara terpisah antara aset dan kewajiban menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, serta kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Namun penyajian berdasarkan likuiditas dapat memberikan informasi yang andal dan relevan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Paragraf 4.5 dalam kualifikasi aset dan kewajiban bahwa penyajian berdasarkan likuiditas diperbolehkan jika memberikan informasi yang andal dan relevan.

2) Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perlakuan akuntansi oleh entitas dalam hal ini yaitu PT BPRS Puduarta Insani, pengakuan dan pengukuran transaksi kas diakui sebesar nilai nominal. Penyajian kas disajikan dalam pos tersendiri dan hal yang diungkapkan yaitu rincian jumlah kas. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.12.

3) Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan / tagihan atau simpanan milik BPRS pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Paragraf 2.12 dimana pendapatan pada bank lain dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan yaitu kelancaran aktivitas operasional.

4) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari suatu periode. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan (SAK ETAP bab 15).

Biaya perolehan dinyatakan dalam aset tetap melalui pertukaran dan penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan dan penyusutan dihentikan ketika aset tetap dihentikan pengakuannya. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP bab 15 tentang Aset Tetap.

5) Rupa-rupa Aset

Rupa-rupa Aset adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Rupa-rupa Aset diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP karena memiliki manfaat di masa mendatang dan biaya dapat dihitung secara andal.

6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang masa kini BPRS yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaian diharapkan arus keluar dari sumber daya milik BPRS dan mengandung manfaat ekonomi. Entitas sudah menerapkan pos-pos kewajiban yang umum yang harus dimiliki oleh BPRS sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Akan tetapi entitas tidak mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka

pendek dan jangka panjang namun disajikan berdasarkan waktu jatuh tempo. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan dalam SAK ETAP karena kewajiban dapat disajikan berdasarkan waktu jatuh tempo atau likuiditasnya.

7) Liabilitas segera dibayar

Liabilitas segera dibayar adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPRS baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.35.

8) Liabilitas kepada bank lain

Liabilitas kepada bank lain adalah kewajiban BPRS kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Hal ini memiliki manfaat bagi entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Ini berarti sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.35 dalam hal pengakuan kewajiban.

9) Pinjaman diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPRS lain. Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto dan disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi.

10) Rupa-rupa passiva

Rupa-rupa passiva merupakan pos yang dimaksud untuk menampung kewajiban BPRS yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada. Rupa-rupa passiva diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan

disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

11) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPRS setelah dikurangi semua kewajiban.

a) Modal

Modal terdiri dari modal disetor yang ditempatkan dan modal pinjaman. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Modal pinjaman adalah utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPRS dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, sedangkan beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional.

Laporan laba-rugi entitas mencakup minimal pos-pos yaitu pendapatan, beban penyisihan kerugian, penyusutan, bagian keuangan, bagian laba/rugi operasional, beban pajak, dan laba/rugi neto. Entitas sudah sesuai dengan SAK ETAP karena semua pos pendapatan dan beban sudah diakui dalam laporan laba/rugi.

1) Pendapatan operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPRS. Pendapatan operasional pada laporan entitas terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPRS pada aset produktif, dimana pendapatan bagi hasil dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPRS. Entitas mengakui

pendapatan bagi hasil secara akrual, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 20.27 (a) bahwa bunga harus diakui secara akrual. Walaupun terdapat perbedaan kata akan tetapi sudah sesuai dengan SAK ETAP.

2) Beban operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPRS. Beban operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba/rugi. Beban diakui karena adanya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Hal ini sudah sesuai dengan pengakuan beban dalam SAK ETAP paragraf 2.37.

3) Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan dari kegiatan utama BPRS. Termasuk dalam pos ini adalah keuntungan (kerugian) yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap. Pendapatan non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPRS dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba/rugi. Pendapatan-non operasional memberikan manfaat ekonomi, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP 2.36.

4) Beban non-operasional

Beban non-operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPRS. Beban non-operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba/rugi. Beban non-operasional disajikan sebagai pengurang dari pendapatan non-operasional. Beban non-operasional mengurangi manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.20 (b).

5) Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba/rugi pada satu periode. Dalam laporan PT BPRS Puduarta Insani, pos diberi nama taksiran pajak penghasilan dan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba/rugi. Taksiran pajak penghasilan diakui pada

saat terjadinya, sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Taksiran pajak penghasilan disajikan sebagai pos pengurang laba (rugi) sebelum pajak penghasilan yang menghasilkan laba (rugi) neto. Entitas sudah mengakui kewajiban atas pajak penghasilan periode berjalan. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP 24.3.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPRS yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPRS selama periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode pelaporan serta pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas BPRS antara lain meliputi : penambahan modal saham dan saldo laba (laba ditahan). Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 6 dalam hal laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPRS selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Entitas sudah mengelompokkannya menjadi tiga arus kas yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktiivitas pendanaan. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 7.7.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPRS dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah pemberian dan pelunasan produk penyaluran dana BPRS, penerimaan dan pembayaran simpanan, penempatan dan penarikan deposito pada bank lain, dan penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diterima dari bank umum, BPRS dan pihak lain.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi terdiri dari

pembelian aset tetap dan inventaris, penjualan/pengurangan aset tetap dan inventaris, pembelian/penjualan aset tidak berwujud.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPRS. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan diantaranya penerimaan/pembayaran pinjaman, penerimaan pembayaran modal, dan pembayaran jasa produksi. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Bab 7 dalam hal laporan arus kas.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPRS. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPRS, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos neraca, penjelasan pos-pos laba rugi, dan lampiran. Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP, yang dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat dicapai. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPRS telah menyusun laporan keuangan dengan menerapkan aturan sesuai dengan SAK ETAP.

4. Kendala-kendala penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan suatu peraturan yang digunakan oleh BPRS. SAK ETAP BPRS disusun dalam rangka mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, tidak terdapat kendala yang dialami oleh PT BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan informan bagian akuntansi :

Pada dasarnya tidak ada kendala, karena memang kami menyesuaikan yang berlaku. Kami sudah by sistem, jadi saat ada perubahan aturan, kami komunikasikan ke penyedia sistem kami.³⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan dalam proses penerapan SAK ETAP pada pelaporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani.

³⁴ Wawancara dengan Rikhi Rinanda tanggal 10 Januari 2019 di PT BPRS Puduarta Insani yang beralamatkan di Jl. Besar Tembung No. 13 A, Deli Serdang, Sumatera Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa PT BPRS Puduarta Insani sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hal ini dapat dibuktikan :

1. Entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Tidak terdapat kendala dalam penerapan SAK ETAP di PT BPRS Puduarta Insani dalam proses penyajian laporan keuangannya.

B. Saran

Penelitian memberikan saran :

1. Bagi BPRS Puduarta Insani diharapkan dapat terus mematuhi peraturan dari Bank Indonesia dalam menerapkan SAK ETAP sebagai pedoman laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan SAK ETAP bagi BPRS dalam penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Dari Buku :

DSAK, IAI. *SAK ETAP*, Jakarta : IAI, 2016.

Wahyu, Supami Setiyowati, et. al. *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP*, Jakarta : Mitra Wacana Media 2018.

Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015.

Sitanggang, Sirius, et. al. *Panduan Akuntansi Keuangan Bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017.

Sochib. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.

Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016.

Pramono, Peni R. *Membedah Laporan Keuangan Sangat Mudah*, Jakarta : PT Elex Media Kompotindo, 2017.

Wahyudiono, Bambang. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2016.

Santana, Setiawan K. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian*, Sukabumi : Cv Jejak, 2017.

Muchson, M. *Metode Riset Akuntansi*, Jakarta : Spasi Media, 2017.

Hariwijaya, M. *Metodologi Dan Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, Jakarta: Diandra Kreatif, 2017.

Referensi Dari Skripsi Dan Jurnal :

Yuliza, Arma. *Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK ETAP Pada BPR Di Kota Pasir Pengaraian*, [Https://Media.Neliti.Com](https://Media.Neliti.Com), 2018.

Widy, Singgih Prasetyo. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kota Bandar Lampung*, Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung, 2017.

Indah, Suci Sari. *Penerapan SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Koperasi Kaperda PTPN II Tanjung Morawa*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Tamon , Jovan R. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. BPR Cipta Cemerlang (CCI) Manado*, Jurnal, Vol. 16, No. 04, 2017.

Referensi Dari Internet :

Syariah Bank.Com, *Apa Itu BPRS?*, [Https://Www.Syariahbank.Com](https://www.Syariahbank.Com), 2018.

OJK, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, [Http://www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) , 2018.

Wawancara dengan Rikhi Rinanda tanggal 10 Januari 2019 di PT BPRS Puduarta Insani yang beralamatkan di Jl. Besar Tembung No. 13 A, Deli Serdang, Sumatera Utara.